

ABSTRAK

PERAN INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) DALAM PENERAPAN PRINSIP NETRAL POLITIK PIAGAM OLIMPIADE PADA OLIMPIADE TOKYO 2020

Oleh:

ZIZI FRANSISCO

Piagam Olimpiade menegaskan pemisahan antara Olimpiade dan politik, dengan International Olympic Committee (IOC) sebagai otoritas tertinggi yang bertanggung jawab menjaga netralitas Olimpiade sesuai prinsip nomor 5 dan 6 serta Pasal 50 Piagam Olimpiade. Menjelang Olimpiade Tokyo 2020, berbagai konflik politik global, seperti ketegangan Israel-Palestina, sengketa Jepang-Korea Selatan, dan perselisihan antara Rusia dan World Anti-Doping Agency (WADA), menantang peran IOC dalam menegakkan netralitas tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, didukung oleh teori neoliberalisme institusional dan konsep norma internasional. Data diperoleh dari jurnal akademik, laporan resmi IOC, dokumen Piagam Olimpiade, serta artikel berita terkait konflik yang melibatkan negara peserta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOC menerapkan resolusi *Olympic truce* untuk menciptakan ruang aman, yaitu lingkungan kompetisi yang bebas dari intervensi politik dan ancaman konflik, terutama bagi atlet dari negara-negara yang sedang berkonflik, seperti Israel dan Palestina. Dalam kasus sengketa Jepang-Korea Selatan, IOC mengambil peran mediasi untuk memastikan Olimpiade tidak digunakan sebagai ajang ekspresi klaim politik. Sementara itu, dalam konflik Rusia-WADA, IOC menyeimbangkan prinsip netralitas dengan integritas olahraga dengan menegakkan sanksi terbatas, yaitu melarang penggunaan atribut nasional Rusia tetapi tetap mengizinkan atletnya bertanding di bawah bendera netral Russian Olympic Committee (ROC). Dengan langkah-langkah ini, IOC menunjukkan kapasitasnya dalam menjaga Olimpiade tetap terpisah dari politik eksternal, yakni intervensi atau kepentingan negara-negara yang berpotensi mengganggu semangat persatuan dalam ajang olahraga global ini.

Kata Kunci: IOC, konflik politik, Olimpiade Tokyo 2020, *Olympic truce*, Konflik Israel-Palestina, Konflik Jepang-Korea Selatan, Konflik Rusia-WADA.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) IN IMPLEMENTING THE POLITICAL NEUTRAL PRINCIPLES OF THE OLYMPIC CHARTER AT THE 2020 TOKYO OLYMPICS

By:

ZIZI FRANSISCO

The Olympic Charter emphasizes the separation between sports and politics, with the International Olympic Committee (IOC) as the highest authority responsible for maintaining the neutrality of the Olympics in accordance with Principles 5 and 6 and Article 50 of the Charter. Leading up to the Tokyo 2020 Olympics, global political conflicts, such as the Israel-Palestine tensions, the Japan-South Korea territorial dispute, and the Russia-WADA conflict, challenged the IOC's role in enforcing this neutrality. This study uses a qualitative approach with a case study method, supported by institutional neoliberalism theory and international norms concepts. Data was obtained from academic journals, IOC official reports, the Olympic Charter documents, and news articles related to the conflicts involving participating countries. The research findings show that the IOC applied the *Olympic truce* resolution to create a safe space, an environment free from political interference and conflict, particularly for athletes from warring countries like Israel and Palestine. In the Japan-South Korea dispute, the IOC mediated to ensure that the Olympics was not used as a platform for political claims. Meanwhile, in the Russia-WADA conflict, the IOC balanced neutrality with sports integrity by imposing limited sanctions, allowing Russian athletes to compete under the neutral flag of the Russian Olympic Committee (ROC). These actions demonstrate the IOC's ability to keep the Olympics free from external political influence, ensuring the Games remain focused on unity and peace through sport.

Keywords: IOC, political conflicts, Tokyo 2020 Olympics, political, *Olympic truce*, Israel-Palestine conflict, Japan-South Korea dispute, Russia-WADA conflict.